

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGUPAHAN
PEKERJA DENGAN SISTEM BAYAR PANEN
(Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan
Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FITTANIA SELAWATI

NPM: 1721030026



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGUPAHAN
PEKERJA DENGAN SISTEM BAYAR PANEN
(Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan
Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FITTANIA SELAWATI

NPM: 1721030026

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Dosen Pembimbing I: Dr. H. A. Khumedi Ja'far. S.Ag, M.H

Dosen Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2021 M

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menemukan kejanggalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran yang ditunda dan upah yang didapat masih samar-samar atau perkiraan pada saat masa panen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang sistem bayar panen pada usaha udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interview, dan dokumentasi. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pada awal akad upah akan diberikan pada saat panen. Namun, ketika panen pemilik tambak tidak membayarkan upah itu kepada penjaga tambak, akan tetapi pemilik tambak akan melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun (4 kali panen). Setiap bulan penjaga tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak, namun setiap bon itu tergantung kesepakatan dari pemilik tambak. Pemilik tambak tersebut memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai perkiraannya. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah pengupahan penjaga tambak telah menyimpang dari sistem pengupahan pada awal akad, karena pemilik tambak telah menahan upah tersebut selama 4 kali panen. Pemilik tambak memberi upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya sehingga upahnya menjadi samar. Sedangkan *ijrah* (Upah) yang samar hukumnya fasid.

Kata kunci : Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Upah Mengupah

ABSTRACT

In this study, the researcher found that the irregularities in the payment of wages, namely the payment of wages that are delayed and the wages that are obtained are still vague or estimates at harvest time. The problem in this research is how is the practice of wage payment system for workers in the shrimp pond business in Bandar Agung Village, Sragi District, South Lampung Regency? And how is the review of Islamic economic law regarding the payment system for the harvest in the shrimp pond business in Bandar Agung Village, Sragi District, South Lampung Regency? The purpose of this research is to know and analyze the wage practice of workers with a pay-harvest system and to find out how to review the Islamic economic law regarding the harvest payment system in shrimp business in Bandar Agung Village, Sragi District, South Lampung Regency.

The method used in this research is qualitative method. Qualitative research is research on descriptive research in qualitative research. The data collection method used in this research is the interview method and documentation. And this research is a field research (field research).

The result of this research is that at the beginning of the contract the wages will be given at harvest time. However, when harvesting the owner of the pond does not pay the wages to the pond keeper, but the owner of the pond will calculate the capital when it is one year (4 harvests). Every month the farm keeper is allowed to pay a bill to the owner of the pond, but each bill depends on the agreement of the farm owner. The owner of the pond pays the farm keeper according to his estimates. In view of the Sharia Economic Law, the wages of the pond keepers have deviated from the wage system at the beginning of the contract, because the owner of the pond have withheld the wages for 4 harvests. The owner of the pond pays the pond keeper according to his estimate so that the wages are vague. Meanwhile, *ijarah* (wage), which is vague, is *fasid*.

Keywords : Akad, Sharia Economic Law, Wages

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fittania Sellawati
NPM : 1721030026
Prodi/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen(Studi Pada Usaha Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 12 Februari 2021

penulis

Fittania Sellawati
NPM: 1721030026





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703531, 780421

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan HUKUM Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Udang Di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Fittania Sellawati

NMP : 1721030026

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang

Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumadi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

Anis Sofiana, M.S.I

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh, Fittania Sellawati, NPM:1721030026, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karina, S.H., M.Hum

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji Pembimbing I: Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٠﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan Allah Amat berat siksa-Nya. bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya (Q.S Al-Maidah: 2)



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini. Skripsi ini saya ucapkan atas rasa bentuk syukur dan ucapan terimakasih kepada yang mendoakan saya agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku ayah dan ibuku, Agus Wahyudi dan Sriani terimakasih yang tak terhingga kupersempahkan karya kecil ini kepada mu yang telah memberi kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih yang tiada terhingga motivasi serta semangat yang selalu engkau berikan kepada anakmu ini, sehingga anakmu bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga ini menjadi titik awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karena anakmu dapat menyelesaikan tugas akhir pada Strata 1 ini.
2. Kepada saudari kandungku adikku Amanda Mia Agustin dan Asifa Hanisatul Vadillah yang selalu memberi semangat yang luar biasa agar segera terselesaikan skripsi ini.
3. Kepada sahabat-sahabatku Helen Persia Irawan, Darmiah, Tri Okta Fiani dan Komala Sari terimakasih atas doa, motivasi, serta semangat kalian saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
4. Kepada teman-teman Jurusan Muamalah angkatan 2017 khususnya kelas J, terima kasih atas doa

RIWAYAT HIDUP

Fittania Sellawati adalah nama penulis skripsi ini. Ia merupakan anak pertama dari pasangan bapak Agus Wahyudi dan ibu Sriani, dan memiliki dua orang adik yang bernama Amanda Mia Agustin dan Asifa Hanisatul Fadillah. Penulis dilahirkan di Desa Rejomulyo, 22 Juli 1998. Pendidikan pertama dimulai di SDN Kalirejo yang dimulai tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011. Setelah lulus dari SDN Kalirejo penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 2 Lampung Selatan yang dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Setelah lulus MTS Negeri 2 Lampung Selatan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 PALAS Lampung Selatan yang dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dengan jalur SPAN-PTKIN yang masuk pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahnya serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta dalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Raden Intan Lampung .
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan ibu Juhrotul Khuwah, M.Si selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan hukum ekonomi syariah.
4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far. S.Ag., M.H dan ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepala desa Bandar Jaya bapak dan masyarakat Desa Bandar Jaya terutama petani Tambak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberi data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak, ibu, adik serta keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, dan do'a, serta menunjang pendidikan saya hingga berhasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecil karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Bandar Lampung, 12 Februari 2021

Penulis

Fittania Sellawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) pada umumnya	
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun Dan Syarat Akad	19
4. Macam-Macam Akad	22
5. Asas Berakad Dalam Islam.....	23

B. Akad <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	25
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27
4. Syarat Sah <i>Ijarah</i>	28
5. Pembagian <i>Ijarah</i>	30
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	31
C. Upah (<i>Ujrah</i>)	
1. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)	31
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>)	33
3. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>).....	36
4. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>)	37
5. Waktu Pembayaran (<i>Ujrah</i>).....	37
6. Sistem Pengupahan (<i>Ujrah</i>).....	40
7. Batalnya Upah (<i>Ujrah</i>)	48

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Tambak Udang Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan	
1. Sejarah Berdirinya Tambak Udang	50
2. Visi Dan Misi Petani Tambak Udang	51
3. Tujuan Berdirinya Tambak Udang	51
4. Jenis-Jenis Udang yang dibudidayakan di Tambak	51
5. Proses Penjualan Hasil Panen.....	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	53

BAB IV Analisis Penelitian

A. Praktek Pengupahan Pekerja Tambak Dengan Sistem Bayar Panen	60
--	----

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bayar	
Panen	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi.....	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memahami isi Sripsi ini, secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan, maksud dari judul Proposal ini. Adapun judul Skripsi yang penulis bahas adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” dalam judul tersebut terdapat beberapa kata yang dipandang perlu untuk diberi penegasan.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah-mengupah dan perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam.¹ Hukum ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah yang membahas upah mengupah (*Ijarah*) dan juga yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

2. Upah

Upah adalah pemberian sejumlah imbalan (bayaran) kepada seseorang dengan ketentuan telah mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu yang

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2

telah diperintah dan bayaran diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²

3. Pekerja

Pekerja adalah seseorang yang bekerja dengan menerima upah karena pekerja telah diperintah oleh pengusaha untuk melakukan pekerjaan.³

4. Sistem bayar panen

Sistem bayar panen adalah sistem pembayaran (upah) yang ditangguhkan pada saat panen.

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah bagaimana mekanisme proses pengupahan yang terjadi antara pekerja dan pemilik tambak menurut hukum Ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hubungan antara sesama manusia yang bersifat elatis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan oleh Idris Ahmad “Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmani nya dengan cara yang paling baik”.⁴

Salah satu hal yang termasuk dalam muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong

²Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2019), 137

³Budi Santoso, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama*, (Malang: UB Press, 2012), 9

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Press, 2014), 2

dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al Maidah: 2)

Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktivitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya *gharar* (ketidak jelasan) dan *dharar* (merugikan salah satu pihak). Dalam bertransaksi muamalah hendaknya ada kerelaan diantara kedua belah pihak, kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirinya”. (QS. An-Nisa: 29)

Salah satu bentuk kerjasama dalam klasifikasi muamalah adalah *ijarah*. Secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'upah' (pengganti) oleh karena itu *thawah* (pahala) tersebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syariat Islam dinamakan *ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁵ Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagaimana firman Allah QS. At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Talaq: 6)

Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknnya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul

⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29

*Razzaq salam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.*⁶

Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah saat menjadi seseorang untuk dijadikan buruh atas pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits telah jelas memperbolehkan akad *ijarah*, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan akad *ijarah*, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam realitanya perkembangan praktek upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik perdesaan maupun perkotaan, salah satu bentuk upah mengupah yang menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa penjaga tambak dengan sistem bayar panen yang ada di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Penjaga tambak menjaga tambak di Desa Bandar Agung tidak terikat waktu, akan tetapi mereka harus bertanggungjawab atas udang yang berada di dalam tambak tersebut. Pemilik tambak menjelaskan akan memberikan upah kepada penjaga tambak pada saat setiap panen. Namun, ketika masa panen pemilik tambak tidak melakukan perhitungan modal dan tidak memberikan upah kepada penjaga tambak, pemilik tambak memberikan upah berdasarkan perkiraan. Akan tetapi penjaga tambak boleh berhutang kepada pemilik tambak maksimal Rp. 500.000 per bulan, hal ini tergantung persetujuan dari pemilik tambak.

⁶Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 940

Ketika panen tiba, pemilik tambak juga langsung membawa hasil panen ke gudang, dan tidak menimbang ikan di tambak. Hal ini menyebabkan penjaga tambak tidak mengetahui berat hasil panen yang akan dijual. Pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak sesuai dengan perkiraannya.

Hal ini berbeda dengan mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak yang lain, disana ada sekelompok pemilik tambak yang jujur dan terbuka. Ketika menimbang hasil panen. Ada keterbukaan antara pemilik tambak dan penjaga tambak, yaitu mengenai besarnya modal yang dikeluarkan pemilik tambak, dan banyaknya udang yang berhasil dipanen.

Dari penjelasan penulis, dapat diketahui bahwa pemilik tambak memberikan upah kepada penjaga tambak tanpa memberikan rincian yang jelas. Maka dari itu pemilik tambak masih perkiraan atau masih samar-samar. Hal ini membuat penulis ingin meneliti skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini memberikan batasan studi pada pengambilan data sehingga penelitian ini hanya fokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan peneliti. Maka suatu informasi lapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan

masalah saling berkaitan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terletak pada Praktek Pengupahan Pekerja Usaha Tambak Udang Dengan Sistem Bayar Panen di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian pada di atas, maka dapat diambil menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekomomi Syariah tentang sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekomomi Syariah tentang sistem bayar panen pada usaha tambak udang di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis signifikansi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan manfaat keilmuan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen” adalah sebagai berikut:

1. Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau

gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.⁷

Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap buruh cangkul serta upah diberikan dalam bentuk padi, sedangkan pada penelien ini fokus pada praktek upah penjaga tambak serta upahnya diberikan dengan bentuk uang. Selain perbedaan ada juga persamaan yaitu sama-sama upahnya ditangguhkan dan belum jelasnya jumlahnya (samar)

2. Nurul Hidayah (2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. kesimpulannya bahwa pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait tentang fiqh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di Desa Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ijarah* (upah).⁸

Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap pembayaran upah buruh bangunan yang tidak sesuai dengan standar umum dan kadang berubah,

⁷ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul,” (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 11.

⁸ Nurul Hidayah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum”. (Disertasi, UIN Mataram, Mataram, 2018), 8.

sendangkan pada penelian ini fokus pada praktek upah penjaga tambak yang dibayar panen serta upahnya masih ditangguhkan dan belum jelas berapa upah yang didapatkan

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang mengenai dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari pemecahannya.⁹ Metode yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan, dan dalam hal ini, data yang bersumber dari pemilik tambak dan penjaga tambak yang ada di desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21

amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang menjadi dilapangan.¹⁰ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pengupahan Pekerja dengan Sistem Bayar Panen (Studi pada Usaha Tambak Udang Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan).

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dan jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu mereka menjadi objek penelitian ini yaitu pemilik tambak dan penjaga tambak di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan menunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber

¹⁰ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial, (Bandung: Mondar Maju, 1996), 33

data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik tambak dan pekerja tambak di Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 104 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Pada penelitian lapangan ini ditemukan populasi yang berjumlah 102 orang yang melakukan akad upah penjaga tambak dengan sistem panen. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 80

antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹² Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% populasi dapat dijadikan sampel. Adapun Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* yaitu teknik yang paling sederhana (sample). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi.¹³ Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah $12\% \times 102 = 12$ orang diantaranya yaitu:

- 1) Pemilik Tambak 4 orang yaitu Sulaiman, Dullah, Nanto, Sutek.
- 2) Penjaga Tambak 4 orang yaitu Aris Budiman, Sugeng Panji, Waji, Agung.
- 3) Masyarakat Desa 2 orang yaitu Kusnon, Yudi.
- 4) Toko agama 1 orang yaitu Samsul Anwar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Satu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 270

¹³ Ibid., 107

¹⁴ Mo, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154

Interview digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.¹⁵

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah mencapai data mengetahui hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, masalah, foto, fokus rapat dan agenda.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu prose dalam memperoleh suatu data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan¹⁶. Dalam proses editing ini dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal penulis

¹⁵ Sukandarrumidi Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* ,(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008), 194

¹⁶ Bagong Suryanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 93

mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen (Studi pada usaha tambak udang Desa Bandar Agung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan).

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus.

Kajian dengan skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, kemudian pada saat penulis mengumpulkan data-data, kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.¹⁷

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 79

BAB II

LANDASA TEORI

A. Akad (Perjanjian) Pada Umum

1. Pengertian akad

Akad, berasal dari bahasa arab *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang memiliki tiga persamaan, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*'aqada*), dan menetapkan (*lazim*) dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan, yakni suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap serorang atau lebih. Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari "*al-'aqdu*" yang berarti ikatan (*alrabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.¹⁸

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambalilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai.¹⁹

Sedangkan menurut pendapat Try Subakti mendefinisikan akad (perjanjian) adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan dari satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan kabul yang objeknya seseuai dengan syariah,

¹⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 1

¹⁹ Gemela Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 445

maksudnya perjanjian tersebut. berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁰

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam hukum akad terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٨٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (Q.S. Al-Isra’: 34)

Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٩٥﴾

²⁰ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah (Prespektif Hukum Islam)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 20

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 1)

b. Hadis

Hukum Akad juga menjelaskan pada Hadis Rasulullah SAW yitu sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ بَيْنِهِمْ».

عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَى طَائِفَةٌ مِنْهُمْ شَيْئًا. (رواه

بخاري)

“Dari Jabid bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syarutuhun Bainahum “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kita Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR. Bukhori)²¹

Maksud dari hadis ini adalah akad yang diadakan oleh para pihak harusnya didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boelh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak

²¹ Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, *Shohih Bukhori*, (Program Maktabah As-Samilah Versi II) Jilid 3, 259

didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara pihak tentang yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²²

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Suatu akad akan terbentuk bila rukunnya terpenuhi. Adapun rukun akad yaitu sebagai berikut:²³

1) para pihak yang membuat akad (*'aqid*)

Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorangan dan dalam bentuk badan hukum.

Adapun syarat subjek akad tersebut yaitu:

- a) seseorang yang mukallaf, adalah orang yang telah memiliki wewenang tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Pembentukan mukallaf biasanya dengan ukuran sudah baligh.
- b) Badan hukum, yaitu suatu persekutuan (*syirkah*) yang membentuk berdasarkan hukum dan mamiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirian.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, 2004), 3

²³ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 145

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak (serah terima), adalah perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak syarat *shighat 'aqh* yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafud/tathabuyq bainal ijab wal kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).
- c) *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.²⁴
- d) *Ittishad al-kabul bil-hijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.

3) Objek akad (*mahallul 'aqh*)

Syarat objek akad yaitu:

- a) Halal menurut syara';
- b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak);
- c) Dimiliki diserahkan (benda dalam kekuasaan) ;
- d) Dengan harga jelas.

²⁴ Ibid., 146

4) Tujuan akad (*maudhu' al-'adh*)

Tujuan akad sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/'ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan bayaran, sedangkan dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti rugi.

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akat itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan orang yang memiliki.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44

- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Ijab.

4. Macam-macam akad

Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, maka akat terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Akad Sahih

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih itu sendiri yaitu berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah , membagi akad sahih menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad Nafiz, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya;
- 2) Akad Mawquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.²⁶

b. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah dapat terjadi jika terdapat kekurnagan pada rukun dan syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad.

²⁶ Yoyok Prasetio, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 51

Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad ataupun adanya larangan langsung dari hukum Islam atas akad tersebut;
- 2) Akad fasah, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syari'at, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

5. Asas berakad menurut Islam

Menurut Islam asas berakad dibagi menjadi tujuh asas yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Asas Ilahiah

Asas ini adalah asas kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (katauhidan) Asas ilaihiyah, menurut ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi menjadi dua bagian yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rubbiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesabaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-NYa ke arah keberhasilan.

b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 98

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermualah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

c. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lain. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl : 71 “*Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.*” Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Asas keadilan (*Al-‘Adalah*)

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asa ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

memenuhi perjanjian merkea buat, dan memenuhi semua kewajibanya.²⁸

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Segala transaksi yag dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah hal harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

g. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Suatu perikatan dilakukan secara tertulias, dihadiri oleh saksi-sakdi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu

²⁸ Ibid., 95

benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan ini menjadi alat bukti atau terjadinya perikatan tersebut.²⁹

B. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Akad menurut KHES yang terdapat di buku II tentang akad dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁰

Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan. Sedangkan Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *ijarah* yaitu kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaga kerjanya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga kerjanya (*musta'jir*), serta pemilik harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertakan kompensasi (imbalan).³¹

Jadi Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Surat Al-Baqarah ayat 233

²⁹ Ibid., 98

³⁰

³¹ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, 231

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat ini menjelaskan tentang memperbolehkan suatu akad ijarah. Pendapat menurut pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusui anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan bergama Islam dari pihak

keduanya sebab orang Islam boleh menyewakan orang kafir. Menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembabanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakad, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena akad memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.³²

- b. Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal *ainnya* sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidak sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masma berakhirnya perjanjian itu.
- c. *Ujrah* (upah). Disyaratkan untuk diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis atau sifatnya.
- d. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- e. *Sighat ijab kabul*, yaitu lafas yang menunjukkan *ijarah*, seperti “aku sewakan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan sewa Rp. Rp. 200.000,00” kata si *musta'jir*.
- f. *Mu'jir* dapat menyewakan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan *syara'*.
- g. Tidak boleh *ijarah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya *fardu ain*.

4. Syarat Sah *Ijarah*

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad *ijarah* jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak didasari suka rela atau dalam keadaan

389 ³² Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007),

terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.³³

b. Objek Akad

Objek akad adalah manfaat barang atau jasa yang disewakan atau pekerjaan harus jelas. Syarat ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.³⁴

c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga tidak dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang yang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan fiqih.

d. Manfaat barang atau jasa yaang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'I tidak boleh dipenuhi.³⁵

³³ Ibid., 35

³⁴ Ibid., 107

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 108

- e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga kerja atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengaji Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.

Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak dibolehkan menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.³⁶

5. Pembagian *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan onjek *ijarah* tersebut. Ulama Syafi'i membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) :

³⁶ nasrul haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235

- a. *Ijarah 'ain* (penyewaan barang) adalah *ijarah* atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil.
- b. *Ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah *ijarah* untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan.

6. Berakhirnyaa Akad Ijarah

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa sendiri. Akad ini berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *ijarah* telah³⁷ berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.

C. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian upah (*Ujrah*)

³⁷ Sabid, *Fiqih Sunnah* 13 terj. Kamaluddin A. Marzuki, 34

Secara bahasa (*etimologi*) upah berarti imbalan atas penggantian. Sedangkan menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.³⁸

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang artinya ‘*iwad* (ganti) atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.³⁹

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa ataupun pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk menjelaskan sesuatu, gaji, dan imbalan.⁴⁰

Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat) No. 13 Tahun 2003. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar untuk suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴¹

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai

³⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 187

³⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29

⁴⁰ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 215

⁴¹ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitungnya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 78

jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberian dan penerima kerja.⁴²

Sedangkan menurut pernyataan Profesoe Benhan “*ujrah* adalah uang ang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.⁴³

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁴⁴

2. Dasar hukum Upah (*Ujrah*)

Adapun pendapat jumhur ulama yang membenarkan *Ujrah* berdasarkan dasar hukum yang terdapat di Al-Qur'an, sunnah dan Ijma yaitu :

a. Dalam Al-Qur'an

1) Surat az-zukruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka*

⁴² Widhi Wicaksono Dkk, *Ekonomi Islam Metode Hahslm*, (Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), 87

⁴³ Afzakur Rahman, *Dokrin Ekonomi Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361

⁴⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. az-Zukhruf ayat 32)

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

2) Surat al- Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mebgambil upah untuk itu”. (Surat Al-Kahfi: 77)

3) Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. at-Taubah:105)

Ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslim.

b. Hadits

Hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum upah menurut sunnah yaitu :

- 1) Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْلَ عَرْقُهُ) رَوَاهُ مُجَاهٌ

“Dari Ibnu Umr Radiliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda “berikanlah kepada

pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” Riwayat Ibnu Majah.”⁴⁵

- 2) Hadis kedua, tentang menentukan upah sebelum memperkerjakan seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abdul Razaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ

الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ ٥

“Dari Abu Said Al-Khudry Radiliyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul Razzaq.”⁴⁶

3. Rukun dan syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:⁴⁷

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) manfaat

b. Syarat upah (*Ujrah*)

⁴⁵ Ibnu Hajar Alaqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darrun Nasyir Al Misyriyyah.Th), 18

⁴⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, 278

Adapun syarat-syarat upah (*ujrah*) sebagaimana ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- 1) Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambalih disyaratkan telah balig dan berakad.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah
- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 6) Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁸

4. Macam-macam upah (*Ujrah*)

Di dalam Fiqh Muamalah upah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syartnya ketika harus disertai kerelaan satu belah pihak yang berakad.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 279

- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya, serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesional kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴⁹

5. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang diharamkan haram dan yang menghalalkan yang haram.⁵⁰

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam

⁴⁹ M.I Yusanto dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 67

⁵⁰ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), 874

akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁵¹ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kelaziman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْوَلَدَ جَيْرَ أَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari ‘Abd Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).⁵²

Berdasarkan Hadis ini menjelaskan tentang pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.

⁵¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141

⁵² Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Shahih Al Bukhari*, No. 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsil, 2002), 816

Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh Yusuf Qhardhawi dalam kitabnya pesan *nilai dan moral dalam perekonomian Islam* menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika iai telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat oleh syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁵³ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا يَنْظِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخاري)
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Dari Amr ibn Amir, katanya: aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya”. (H.R al-Bukhari)⁵⁴

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan

⁵³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hasil Hadis Ekonomi)*(Jakarta: Kencana, 2015), 222

⁵⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, 529

orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁵⁵

6. Sistem pengupahan

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dari dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhiratnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah di dunia agar upah yang di akhiratnya juga tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁵⁶

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,⁵⁷ kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membolehkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak

⁵⁵ Idri, Hadis Ekonomi (*Ekonomi Dalam Perspektif Hasil Hadis Ekonomi*), 233

⁵⁶ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), 71

⁵⁷ Atzanur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 362

manapun. setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

.....لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“.....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....”(Al-Baqarah: 279)

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Oleh sebab itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap

menindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”. (Al-Jaatsiyah: 22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal ini dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat yang menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang Prinsip ini disebut lagi dalam surat Al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَفَ بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan.” (QS. Al Ahqaf: 19)

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁵⁸ salah satu upaya untuk melindungi hal pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan orang yang memperkerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang berkait dengan kesepakatan kerja⁵⁹ :

a. Ketentuan kerja

Ujrah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *Ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

b. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. di dalam *Ujrah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir.

⁵⁸ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008),227

⁵⁹ Ibid., 229

c. Waktu kerja

Dalam transaksi *Ujrah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

d. Gaji kerja

Di masyaratkan juga honor transaksi *Ujrah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *Ujrah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat jelas.

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan/pemilik usaha biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem pembayaran upah dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Sistem upah jangka waktu

Sistem upah jangka waktu adalah untuk mengganti sistem upah yang jangka waktunya tidak membuahkan hasil memuaskan.

b. Sistem upah potongan

Sistem upah ini hanya akan diberikan jika pekerjaanya dapat dilihat dari ukuran tertentu, misalnya ukuran dari banyaknya beratnya dan sebagainya.

c. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini adalah suatu sistem yang memberikan upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu, yang selanjutnya kelompok ini akan membagikan kepada karyawan.

d. Sistem upah berubah

Dalam sistem ini, jumlah upah yang akan diberikan berkaitan dengan jumlah penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upahnya pun akan naik, sebaliknya jika harganya turun maka upah akan turun.

e. Sistem upah indeks

Sistem upah indeks ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan demikian sistem upah itu akan naik turun sesuai dengan turun naiknya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai upah.

f. Sistem pembagian keuntungan

Sistem ini disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.⁶⁰

Prinsip utama dalam upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan suatu akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan manikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan

⁶⁰ Zaenai Asyhadie Dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan (Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia)* (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2019), 86.

majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjanya itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerjaan golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.

a. Tingkat upah minimum

Pekerja dengan hubungan dengan pemilik beradadalam posisi terlindungi dan terjaga dengan memberi perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik, sudah menjadi kewajiban para pemilik untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana

diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.

c. Tingkat upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerjaan. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batasan yaitu undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.⁶¹

7. Batalnya upah

Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak. Karena *ujrah* termasuk akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.⁶²

⁶¹ Atzahr Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 374

⁶² Sohari Saharani Dan Ru'fs Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Galih Indah, 2011), 170

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, jika barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada ditangannya, maka ia akan tidak mendapatkan upah.⁶³

Sedangkan menurut Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan pendapat ulama-ulama yang lain, antara lain:

a. Jika benda berada ditangan *ajir*

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.

b. Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerjanya.⁶⁴

⁶³ Ibid., 183

⁶⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010), 92

DAFTAR RUJUKAN

- Adisu, Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitungnya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008)
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Satu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Asyhadie, Zaenai Dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan (Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia)* (Jawa Timur: Prenadamedia Group, 2019)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Dewi, Gemela, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ghafur, Abdul Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010)
- Haroen, Nasrul, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Haryanto, Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008)
- Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, *Shohih Bukhori*, (Program Maktabah As-Samilah Versi II) Jilid 3, 259
- Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008)
- Huda, Nurul Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ibnu Hajar Alaqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Darrun Nasyir Al Misyriyyaht.Th)
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hasil Hadis Ekonomi)*(Jakarta: Kencana, 2015)

- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*
- Ilham, Ahmad Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2019)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- MK Widjajakusuma, dan M.I Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Mo, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, 2004)Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Prasetio, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018)
- Rahman, Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rahman, Afzakur, *Dokrin Ekonomi Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Rahman, Atzahur, *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002)
- Rahman, Atzanur, *Dokrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002),
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad S yariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)
- Sabid, *Fiqh Sunnah 13 terj.* Kamaluddin A. Marzuki

Saharani, Sohari Dan Ru'fs Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Galih Indah, 2011)

Santoso, Budi, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama*, (Malang: UB Press, 2012)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019)

Subakti, Try, *Akad Pembiayaan Mudharabah (Prespektif Hukum Islam)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Press, 2014)

Suryanto & Sutinah, Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015)

Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007)

Wicaksono, Widhi Dkk, *Ekonomi Islam Metode Hahslm*, (Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020)

Yazid Bin Majah, Bin Muhammad, *Shahih Al Bukhari*, No. 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsil, 2002)

Jurnal

Nurul Hidayah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum”. (Disertasi, UIN Mataram, Mataram, 2018)

Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul,” (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Wawancara

Agung, (Penjaga Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 21 November 2020

Aris Budiman (Penjaga Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 22 November 2020

Dullah (Pemilik Tambak Desa Bandar Agung), Wawancara, 19 November 2020

Kusnon, (Masyarakat Desa Bandar Agung) Wawancara, 19 November 2020

Nanto (Pemilik Tambak Desa Bandar Agung), Wawancara, 20 November 2020

Paiman (Penjaga Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 19 November 2020

Samsul Anwar (Toko Masyarakat Desa Bandar Agung), Wawancara, 19 November 2020

Sugeng Panji (Penjaga Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 20 November 2020

Sulaiman, (Pemilik Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 19 November 2020

Sutek (Pemilik Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 19 November 2020

Waji (Penjaga Tambak Desa Bandar Agung) Wawancara, 20 November 2020

Yogo Ropani, (Masyarakat Desa Bandar Agung) Wawancara, 20 November 2020

Yudi (Masyarakat Desa Bandar Agung), Wawancara, 21 November 2020

